

# Mimbar Sosek

Journal of Agricultural and Resource Socio-Economics

ISSN: 0215-8434

Volume 9 Nomor 1: April-Agustus 1996

*Isang Gonarsyah*

Evaluasi Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Dalam Negeri

*Dedi Budiman Hakim*

Analisis Karakteristik Rumah Tangga yang Mempengaruhi  
Konsumsi Daging dan Susu di Perkotaan Jawa

*M. Parulian Hutagaol*

Suatu Refleksi Kritis Mengenai Kesenjangan Ekonomi  
Nasional

*Pudji Muljono*

Suatu pemikiran Pendahuluan Tentang Pengembangan  
Sistem Informasi Agribisnis di Institut Pertanian Bogor

*Sediono M.P. Tjondronegoro*

Suatu Tinjauan Ringkas Mengenai Perkembangan  
Kelembagaan Penelitian di Indonesia

IN MEMORIAM



Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian  
Fakultas Pertanian  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
INDONESIA

**SUATU PEMIKIRAN PENDAHULUAN TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AGRIBISNIS  
DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*(A Preliminary Thought on Development of Agribusiness Information System at Bogor Agricultural University)*

Pudji Muljono<sup>1)</sup>

*Abtrak*

*Tulisan ini memaparkan suatu pemikiran mengenai pengembangan sistem informasi agribisnis di Institut Pertanian Bogor dalam rangka untuk memberikan pelayanan optimal terhadap kebutuhan informasi sektor agribisnis. Disarankan agar pengelolaan sistem informasi ini sebaiknya dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan IPB, mengingat unit ini telah ditunjuk sebagai pusat layanan disiplin ilmu (Pusyandi) bidang pertanian di Indonesia. Untuk kelancaran pengelolannya, perlu diwujudkan kerjasama dengan berbagai pihak menyangkut pengadaan, pengolahan, dan pelayanan informasi agribisnis tersebut. Selain itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan sumberdaya manusia yang menjadi pengelolanya, melalui pendidikan dan pelatihan*

*(Kata kunci : sistem informasi agribisnis, Pusyandi)*

**1. Pendahuluan**

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 dengan lebih tegas mengatakan, bahwasanya pembangunan pertanian mempunyai kaitan yang erat dengan sektor lainnya. Kuatnya kaitan antara pembangunan sektor pertanian dengan sektor lainnya diharapkan bukan saja akan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian itu sendiri, tetapi juga akan dapat memperkokoh perekonomian perdesaan, yang pada gilirannya dapat memperkecil kesenjangan antara desa dan kota.

Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, maju dan efisien, strategi dasar yang ditempuh dalam Repelita VI adalah pembangunan pertanian berwawasan agribisnis. Dengan strategi dasar ini, keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian merupakan

---

<sup>1)</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB

unsur yang mutlak. Salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan pertanian dengan strategi ini, adalah adanya keterpaduan dan saling mendukung antar subsistem dalam agribisnis, antar sektor dalam sistem perekonomian nasional, dan antar wilayah dalam tatanan kesatuan nusantara. Melalui pengembangan sistem agribisnis terpadu dapat dihasilkan produk-produk pertanian dan produk agroindustri berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.

Pengertian agribisnis menurut Departemen Pertanian (1994) meliputi semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani atau komoditi olahan. Dengan demikian, agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari : (a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, (b) subsistem usahatani/produksi, (c) subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian, serta (d) subsistem pemasaran.

Pada garis besarnya terdapat dua kelompok kendala yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis di Indonesia, yakni kendala substansi dan kendala organisasi atau kelembagaan (Departemen Pertanian, 1994). Kendala substansial terdiri dari : (a) tersebarnya hamparan lahan usahatani sehingga penyebaran informasi sulit dilakukan; (b) kurang beragamnya komoditas ekspor dan pasar ekspor; (c) kurangnya kegiatan dan pengetahuan untuk menyiasati pasar (*market intelligence*); (d) kurangnya upaya promosi pasar di luar negeri; (e) kurang memadainya dukungan pemerintah untuk merangsang dan mempermudah akses pasar; (f) kurangnya upaya untuk mengembangkan standar mutu hasil pertanian, baik yang menyangkut bahan mentah, maupun hasil olahannya; (g) kurangnya upaya untuk merangsang investasi bidang agribisnis; (h) kelangkaan kualitas sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan memadai dalam manajemen agribisnis, teknologi pengolahan, serta pengetahuan mengenai mutu.

Kendala organisasi atau kelembagaan meliputi: (a) belum berkembangnya lembaga pemasaran domestik maupun ekspor; (b) terjadinya informasi pasar kepada petani secara asimetris akibat belum berfungsinya lembaga-lembaga pemasaran; (c) upaya koordinasi intensif dalam membangun sistem informasi terpadu belum banyak dilakukan; (d) iklim persaingan belum berkembang secara baik; (e) lemahnya manajemen pemasaran terutama di daerah pedesaan; (f) kurangnya asosiasi-asosiasi untuk setiap jenis komoditas.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan sistem agribisnis yang berkelanjutan adalah membangun sistem informasi agribisnis yang terpadu, yang memungkinkan semua pihak yang terkait pada sistem agribisnis memahami segala permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan suatu sistem agribisnis.

Sebagai perguruan tinggi pertanian terkemuka, Institut Pertanian Bogor (IPB) dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu sebagai langkah awal dan mendasar, sudah saatnya IPB mengembangkan suatu sistem informasi agribisnis yang mampu memantau dan menyebarkan secara berkelanjutan beragam permasalahan dalam sistem agribisnis dan solusinya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Masalah yang perlu dicarikan pemecahannya dalam rangka mengembangkan sistem informasi agribisnis di IPB, ialah: (a) siapa yang mengelola dan bagaimana mekanisme pengelolaan sistem informasi agribisnis di IPB; (b) bagaimana sistem pengadaan informasi agribisnis tersebut sehingga dapat tersedia secara optimal; (c) bagaimana cara mengolah informasi agribisnis tersebut agar mudah disimpan dan ditemukan kembali pada saat diperlukan; (d) bagaimana sistem pelayanan informasi agribisnis yang efektif dan efisien sehingga dapat digunakan secara mudah, cepat dan tepat oleh para pengguna.

Tujuan kajian ini adalah untuk memberi masukan bagi terciptanya sistem informasi agribisnis di Institut Pertanian Bogor, yang meliputi pengelola dan mekanisme pengelolaan struktur kelembagaan yang; di dalamnya mencakup sistem pengadaan, sistem pengolahan, dan sistem pelayanan informasi, yang relevan dengan konsep dan implementasi pengembangan agribisnis.

Adapun kegunaan sistem informasi agribisnis di IPB adalah : (a) tersedianya akses informasi tentang agribisnis sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang membutuhkannya, baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB; (b) sistem informasi agribisnis di IPB memungkinkan dilakukannya pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan informasi dalam bidang agribisnis; (c) memungkinkan terjadinya jaringan kerjasama antara IPB dan pihak lain, dalam rangka membina dan mengembangkan informasi agribisnis secara berkelanjutan; (d) dapat menunjang

terlaksananya program Tri Dharma Perguruan Tinggi di IPB baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2. Kelembagaan dan Pengelolaan**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IPB telah ditunjuk sebagai Pusyandi (Pusat Pelayanan Disiplin Ilmu) untuk bidang pertanian di seluruh Indonesia. Sementara itu, pengelolaan sistem informasi agribisnis di IPB, perlu terstruktur dalam suatu lembaga atau unit khusus di IPB, yang sehari-hari mengelola informasi. Dengan demikian, cukup relevan apabila mekanisme pengelolaan sistem informasi agribisnis di Institut Pertanian Bogor tidak dipisahkan dari UPT Perpustakaan IPB. Peranan yang sudah dimiliki UPT Perpustakaan IPB diharapkan dapat memperkuat berkembangnya sistem informasi agribisnis yang akan dirintis di IPB.

Sistem informasi agribisnis yang akan dibentuk dan dikembangkan di IPB mempunyai fungsi yang sejalan dengan fungsi yang diemban oleh perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979) dalam buku *Pedoman Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi*, perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi, pusat pelestarian informasi, pusat pengolahan informasi, pusat pemanfaatan informasi, dan pusat penyebarluasan informasi. Dalam hal ini sistem informasi agribisnis di IPB juga berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi, pusat pelestarian informasi, pusat pengolahan informasi, pusat pemanfaatan informasi, dan pusat penyebarluasan informasi dengan kekhususan, subyek tentang agribisnis.

Agar dapat menjalankan fungsinya, sistem informasi agribisnis di IPB perlu dicantumkan dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) di UPT Perpustakaan IPB, yaitu sebagai sistem yang mengembangkan koleksi khusus. Menurut Wirawan (1993), SPO di suatu perpustakaan merupakan prosedur operasi untuk mendapatkan masukan, pemrosesan, pelaksanaan dan pengukuran kuantitas serta kualitas keluaran perpustakaan, yang berupa berbagai layanan perpustakaan. Sejauh ini, UPT Perpustakaan IPB telah memiliki SPO sebagai standar kerjanya, yang disebut Standar Pedoman Kerja UPT Perpustakaan IPB. Sayangnya, standar kerja yang disusun pada tahun 1993 tersebut belum mencantumkan panduan tentang pengelolaan sistem informasi agribisnis secara khusus.

Panduan kerja mengenai pengelolaan sistem informasi agribisnis di IPB yang akan dicantumkan dalam Standar Pedoman Kerja UPT Perpustakaan IPB, dapat berisi tentang misi, fungsi, dan peranan sistem informasi agribisnis di IPB; sistem pengembangan koleksi agribisnis di IPB, sistem pengolahannya, sistem penyimpanannya, sistem pelayanannya, serta penyebarluasan informasi agribisnis tersebut.

### **3. Sistem Pengadaan**

Kegiatan pengadaan bahan pustaka untuk mendukung sistem informasi agribisnis di IPB dapat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pengadaan bahan pustaka yang dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan IPB. Koleksi bahan pustaka mengenai agribisnis dapat dihimpun melalui pembelian, tukar menukar, dan hadiah. Proses penghimpunan koleksi itu harus berdasar pada Standar Pedoman Kerja yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan IPB, sehingga bahan yang akan dihimpun menjadi terarah.

Penetapan kebijakan pengembangan koleksi perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan tujuan dan fungsi dari pembentukan sistem informasi agribisnis, yakni sejalan dengan tujuan dan fungsi UPT Perpustakaan IPB. Sebagaimana telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979), tujuan penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi adalah mendukung, memperlancar, serta mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi melalui pelayanan informasi. Hal ini meliputi lima aspek, yaitu pengumpulan informasi, pelestarian informasi, pengolahan informasi, pemanfaatan informasi, dan penyebarluasan informasi. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0103/O/1981, fungsi perpustakaan perguruan tinggi adalah sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan tujuan dan fungsi tersebut, pengguna utama yang wajib dilayani oleh sistem informasi agribisnis di IPB adalah civitas akademika, yang terdiri dari staf pengajar dan mahasiswa IPB.

Kebijakan pengembangan koleksi bidang agribisnis perlu memperhatikan karakteristik koleksi yang akan dikembangkan, cara penghimpunan atau pengadaan, penyeleksian bahan pustaka, dan kemungkinan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Cakupan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik koleksi, mencakup bentuk bahan pustaka yang akan dikoleksi, kemutakhiran, bahasa, dan tingkat intelektualitas bahan pustaka dalam bidang agribisnis.

Bentuk bahan pustaka yang dikoleksi ditekankan pada bentuk tercetak, baik berupa buku, serial ilmiah, laporan penelitian, terbitan berseri lainnya, skripsi/tesis/ disertasi. Bahan pustaka dalam bentuk mikro dan audio visual tidak menjadi prioritas, kecuali bila diperoleh melalui hadiah.

Untuk menjaga kemutakhiran, prioritas bahan pustaka yang dibeli adalah terbitan tahun yang akan datang atau 3 tahun terakhir. Bahan pustaka yang diperoleh melalui hadiah atau pertukaran diutamakan pada terbitan 5 tahun terakhir.

Prioritas penyeleksian bahan pustaka mengenai agribisnis terutama didasarkan pada pustaka yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian menyusul berbahasa Jerman, Perancis, Jepang, dan Belanda.

Menurut Widharto (1990) tingkat intelektualitas bahan pustaka dapat diprioritaskan dengan urutan sangat ilmiah, ilmiah populer, dan populer.

- b. Penghimpunan publikasi ilmiah IPB (misalnya disebut IPB-ana).

Publikasi ilmiah civitas akademika IPB mengenai agribisnis harus dihimpun di UPT Perpustakaan IPB. Publikasi tersebut dapat berupa laporan penelitian, buku, serial seminar/prosiding, dan serial ilmiah. Untuk itu Surat Keputusan Rektor IPB tentang wajib simpan karya tulis bagi civitas akademika IPB perlu diaktifkan kembali.

- c. Penyeleksian bahan pustaka yang akan dibeli.

Perlu adanya kebijakan seleksi kegiatan pembelian bahan pustaka, menyangkut nilai keilmiahannya, duplikasi, koleksi mikro yang sudah ada, dan bahan pustaka yang jarang dipakai. Berkaitan dengan kegiatan seleksi ini, kiranya perlu dibentuk Komisi Pengembangan Koleksi, di mana dalam keanggotaannya dapat dilibatkan pimpinan perguruan tinggi, pustakawan dan staf pengajar.

- d. Penyeleksian serial ilmiah yang dibeli/dilanggan.

Penyeleksian ini dapat menyangkut koleksi inti/semi inti, berapa jumlah eksemplar untuk tiap judul, dan faktor anggaran yang tersedia, dan sebagainya.

- e. Penyeleksian bahan pustaka yang diterima melalui hadiah.  
Bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah diseleksi dengan kriteria yang sama sebagaimana bahan pustaka yang berasal dari pembelian.
- f. Tukar-menukar publikasi mengenai agribisnis.  
Pertukaran publikasi dilakukan dengan instansi yang memiliki publikasi agribisnis untuk dipertukarkan. Publikasi IPB yang potensial untuk dipertukarkan antara lain *Indonesian Journal of Tropical Agriculture*, *Forum Pasca Sarjana*, *Agrirek*, dan *Mimbar Sosek*.
- g. Pengadaan surat kabar yang berkaitan dengan bidang agribisnis.  
Surat kabar yang memuat artikel bidang agribisnis sebaiknya dilanggan dan dikliping artikelnya.
- h. Pengadaan terbitan pemerintah mengenai agribisnis.  
Semua publikasi dari lembaga dan departemen mengenai agribisnis perlu diadakan secara teratur.
- i. Melakukan kerjasama pengadaan koleksi bidang agribisnis dengan instansi dalam dan luar negeri.  
Salah satu lembaga di dalam negeri yang potensial untuk diajak bekerjasama, adalah Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian (Pustaka) yang terletak di Jl. Ir Juanda No. 20, Bogor. Menurut Sundari (1992) lembaga ini sejak tahun 1972 telah bekerjasama dengan perpustakaan sedunia untuk mengadakan pertukaran bahan pustaka melalui sistem Aglinet (The Agricultural Libraries Network), dan merupakan pusat nasional untuk :
  - i. AGRIS (The Agricultural Information System for Agricultural Science and Technology) dengan tujuan mengelola informasi mengenai ilmu dan teknologi pertanian;
  - ii. CARIS (The Current Agricultural Research Information System) dengan tujuan mengelola informasi kegiatan penelitian pertanian yang sedang dan akan berjalan;
  - iii. Apex (Agricultural Post Harvest Production) untuk mengelola informasi mengenai pascapanen;



- iv. NFIS (Network of Fertilizer Information System) dengan tujuan mengelola informasi pemupukan.

Supardi (1993) menyatakan, bahwa banyak pusat-pusat informasi di luar negeri yang patut diperhitungkan guna membina literatur pertanian. Daftar nama pusat-pusat informasi di berbagai kawasan dunia yang memfokuskan pada bidang spesialisasi pertanian disertai dengan kegiatannya, dapat dilihat selengkapnya dalam *Agricultural Information Resource Centres : a World Directory* yang diterbitkan oleh IAALD (International Assosiation of Agricultural Librarians and Documenta- list).

#### 4. Sistem Pengolahan

Pengolahan bahan pustaka pada sistem informasi agribisnis di IPB merupakan salah satu kegiatan yang penting, dalam rangka mempermudah pemakai menemukan kembali informasi yang diinginkan secara cepat dan tepat. Petugas pengolahan diharapkan dapat mengolah bahan pustaka (informasi) secara taat asas, sehingga pemakai dapat memanfaatkan informasi tersebut secara baik dan benar. Pengolahan informasi yang dilakukan, harus memungkinkan kemudahan bagi pemakai pada saat melaksanakan penelusuran baik secara manual maupun dengan komputer.

Kebijakan umum pengolahan bahan pustaka mengenai bidang agribisnis harus sama dengan yang diterapkan di UPT Perpustakaan IPB selama ini. Kesamaan ini berguna untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi agribisnis yang diperlukan oleh pengguna. Kebijakan umum dalam pengolahan informasi agribisnis mencakup pedoman yang dipakai untuk mengolah, sistem katalog, dan petunjuk teknis pengolahannya. Adapun pedoman yang dapat digunakan :

- a. untuk penggolongan subyek dipakai Universal Decimal Classification Scheme, edisi 1985 serta penjurusnya (edisi tahun 1988);
- b. untuk pengkatalogan urai digunakan Anglo-American Cataloguing Rules, edisi kedua;
- c. untuk penentuan tajuk subyek digunakan CAB (Commonwealth Agricultural Bureaux) Thesaurus;
- d. untuk perangkat lunak CDS/Isis digunakan Manual CDS/Isis versi 3.1 atau versi yang lebih tinggi;

- e. untuk pembuatan ruas dan cantuman pangkalan data dipakai Format Indomarc versi UKKP edisi tahun 1990;
- f. IPB-terra digunakan untuk standar pengolahan bahan pustaka di PB.

Pembuatan katalog dalam sistem informasi agribisnis di IPB sebaiknya menggunakan katalog berkelas dengan penjurus subyek. Macam jajaran katalognya, adalah katalog pengarang, katalog judul, katalog kelas, penjurus subyek, dan daftar pengerakan. Jajaran katalog kelas tersebut sekaligus merupakan jajaran katalog utama, karena memuat semua kartu katalog kelas untuk semua jenis bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan IPB, termasuk koleksi perpustakaan fakultas atau cabang. Adapun tentang petunjuk teknis pengolahan bahan pustaka bidang agribisnis dapat disesuaikan dengan standar yang telah diuraikan dalam Standar Pedoman Kerja UPT Perpustakaan IPB (1993) mengenai pengolahan bahan pustaka.

## 5. Sistem Pelayanan

Sistem informasi agribisnis di IPB bertujuan menyediakan layanan informasi dan literatur bidang agribisnis secara tepat, cepat, dan akurat kepada para pengguna. Layanan yang diberikan bersifat aktif maupun bersifat pasif. Adapun pengguna layanan ini meliputi pengguna di lingkungan IPB, yaitu para staf pengajar dan mahasiswa, serta pengguna dari luar IPB yang memerlukan layanan tersebut terutama yang tergabung dalam jaringan Uninet.

Kebijakan pelayanan pengguna informasi agribisnis di IPB dilakukan secara terpadu dengan layanan informasi yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan IPB. Apalagi dengan ditunjuknya UPT Perpustakaan IPB sebagai Pusyandi (Pusat Pelayanan Disiplin Ilmu) untuk bidang pertanian di Indonesia, layanan informasi agribisnis diharapkan akan terlaksana dengan baik. Kebijakan pelayanan tersebut mencakup sistem dan jenis pelayanan, sarana temu kembali, keanggotaan, tata tertib layanan, serta sanksi terhadap pengguna yang tidak mematuhi aturan layanan informasi agribisnis.

Waktu pelayanan informasi agribisnis di IPB disesuaikan dengan waktu pelayanan UPT Perpustakaan IPB yang berlangsung selama ini. Sedangkan sistem pelayanannya dua macam, yaitu sistem pelayanan

terbuka dan sistem pelayanan tertutup. Dalam sistem pelayanan terbuka pengguna diperbolehkan mengambil sendiri bahan pustaka yang diperlukan. Sistem ini berlaku untuk koleksi umum meliputi buku, bahan rujukan, serial, tesis, dan disertasi. Adapun dalam sistem pelayanan tertutup, pengguna tidak diperbolehkan mengambil sendiri bahan pustaka yang diperlukan. Sistem ini diberlakukan untuk koleksi tandon, IPB-ana, laporan penelitian, dan koleksi bentuk mikro atau audio visual.

Jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem informasi agribisnis di IPB, antara lain :

- a. Layanan sirkulasi, yaitu pelayanan yang diberikan kepada para pengguna untuk memperoleh pinjaman bahan pustaka tentang agribisnis dan penyelesaian administrasinya. Layanan sirkulasi hanya diberikan kepada anggota perpustakaan yang memiliki kartu anggota perpustakaan IPB pada tahun yang berjalan. Layanan ini diberikan pula kepada pengguna luar IPB yang memiliki KSP (Kartu Studi Pustaka) yang masih berlaku.
- b. Layanan referensi, yaitu layanan yang diberikan kepada pemakai perpustakaan dalam bentuk bantuan, petunjuk atau bimbingan untuk menemukan bahan pustaka atau informasi tentang agribisnis. Layanan ini diberikan kepada setiap pengunjung perpustakaan yang memerlukan.
- c. Penelusuran informasi, yaitu suatu kegiatan untuk mencari atau menemukan kembali semua kepustakaan yang pernah terbit atau pernah ada mengenai bidang agribisnis. Layanan ini diberikan kepada semua pengguna perpustakaan, baik yang datang langsung, melalui surat, telepon, ataupun internet.
- d. Penyebaran informasi ilmiah terbaru, yaitu kegiatan memberikan informasi kepustakaan agribisnis yang baru terbit atau baru terwujud secara cepat kepada pemakai. Contoh terbitan untuk layanan ini adalah Daftar Tambahan Buku dan Info Pustaka.
- e. Penyebaran informasi terseleksi, yaitu pemberian informasi ilmiah tentang agribisnis yang baru terbit kepada perorangan atau sekelompok orang dan diberikan secara terus-menerus. Jasa ini sifatnya sangat selektif dan pengguna akan mendapatkan abstrak atau artikel sesuai dengan kebutuhannya secara rutin. Dalam hal ini dapat dilakukan pembuatan kliping koran tentang bidang agribisnis untuk menunjang layanan ini.

- f. Penyusunan bibliografi dan indeks, yaitu kegiatan pemilihan bahan pustaka, karangan dalam serial, laporan atau lainnya mengenai bidang agribisnis; kemudian menyusunnya dengan sistem tertentu untuk diterbitkan. Layanan ini juga diberikan kepada perorangan atau lembaga yang ingin melakukan penyusunan bibliografi, indeks/abstrak dari koleksi yang dimilikinya.
- g. Layanan CD-ROM ( Compact Disc Read Only Memory ), yaitu layanan khusus untuk penelusuran abstrak bidang pertanian (termasuk juga mengenai agribisnis) bagi yang memerlukannya.
- h. Layanan pinjam antar perpustakaan, yaitu layanan yang diberikan kepada pengguna agar dapat meminjam bahan pustaka tentang bidang agribisnis dari perpustakaan lain di luar IPB apabila bahan pustaka tersebut tidak ada di IPB.
- i. Layanan audio visual, meliputi pelayanan mikrofilm, mikrofilm, kaset, dan video dengan subyek tentang agribisnis.
- j. Layanan fotokopi dalam rangka mempermudah mendapatkan informasi tentang bidang agribisnis.

Selanjutnya kebijakan dalam pelayanan informasi agribisnis di IPB berkaitan dengan sarana temu kembali, sistem keanggotaan, tata tertib layanan, dan sanksi yang diberikan terhadap pengguna; hal itu dapat disesuaikan dengan kebijakan pelayanan yang saat ini sudah berjalan di UPT Perpustakaan IPB.

## 6. Kesimpulan

Sistem informasi agribisnis perlu dibentuk dan dikembangkan di IPB sehingga perguruan tinggi ini mampu meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan tridharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sistem informasi agribisnis di IPB sebaiknya dikelola oleh UPT Perpustakaan IPB mengingat perpustakaan ini merupakan unit pengelola informasi di lingkungan IPB dan telah dipercaya sebagai Pustandi untuk bidang pertanian di Indonesia. Adapun kebijakan mengenai pengadaan, pengolahan, dan pelayanan informasi agribisnis itu sendiri dapat disesuaikan dengan sistem yang saat ini sudah dijalankan di UPT Perpustakaan IPB.

Keberhasilan sistem informasi agribisnis di IPB dapat tercapai apabila sistem ini mampu memenuhi tujuan utamanya yaitu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pengguna. khususnya civitas akademika IPB dan pengguna luar IPB yang membutuhkan informasi bidang agribisnis. Demi kelancaran pengelolaan sistem agribisnis tersebut, maka UPT Perpustakaan IPB perlu meningkatkan kerjasama jaringan informasi dengan pihak-pihak yang memungkinkan mengadakan kerjasama, baik dalam hal pengadaan, pengolahan, maupun pelayanan informasi bidang agribisnis. Selain itu perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan profesionalisme para petugas perpustakaan yang akan mengelola sistem informasi agribisnis tersebut, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan informasi pertanian.

## **7. Kepustakaan**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. Pedoman Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi (Seri Penerbitan Perpustakaan PPT-02). Jakarta: Sub Proyek Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Departemen Pertanian. 1994. Bahan Ekspose Badan Agribisnis. Jakarta: Badan Agribisnis.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1993. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993: dilengkapi dengan susunan Kabinet Pembangunan VI. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Sumberdaya Informasi. 1993. Standar Pedoman Kerja UPT Perpustakaan IPB. Bogor: UPT Perpustakaan IPB.
- Sundari, Tuti S. 1992. "NFIS: Jaringan Informasi Bidang Pemupukan di Asia Pasifik", *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Vol. I No. 1 : 23-24.
- Supardi. 1993. "Sumber Referens Pertanian: suatu tinjauan", *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Vol. II No. 1 : 14-17.
- Widharto. 1990. "Teknik Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia Khususnya di Bidang Pertanian", *Pertemuan Teknis Strategi Penyebaran Informasi Pertanian dengan Basis Perpustakaan Perguruan Tinggi*, Bogor 5 Maret 1990. Bogor: Lembaga Sumberdaya Informasi - IPB.

Wirawan. 1993. "Peranan Standar Prosedur Operasi Dalam Rangka Penataan Manajemen dan Produktivitas Kerja", Workshop Pemantapan Standar Prosedur Operasi Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, 13 Januari 1993. Bogor: UPT Perpustakaan IPB.